

SKRIPSI
KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(Studi Kasus di PDAM Giri Menang)

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh :
AHMAD FIKRI
216130119T

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2019/2020

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ahamdulillahirabbilalamin, dalam naungan Ridho ALLAH SWT

Kupersembahkan karya ini

Kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta ayahanda (Alm. Sudirman) dan ibunda tersayang (H. Mutmainah) dan (Zahrah) yang sangat kucintai sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih kuucapkan atas ketulusan do'a nasehat, dukungan yang telah diberikan serta kasih saying tak ternilai harganya.
- Kemudian untuk keluarga besar Hamid Family dan H. Raodah family yang selalu memberikan support yang membangun sehingga bisa sampai saat ini.
- Kakakku (Muliati, Akhamd Tajroni, Abdul Kholik) dan adik-adikku (Wira Satria Sari, Abdurahman Sani, M. Reza Syauqon, dan Arjuna Rahman) yang sampai saat ini alasan untuk mengejar kesuksesan.
- Teman hidupku yang selalu kusebut di dalam do'a
- Kawan-kawan yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu karena terlalu banyak , yang selalu memberi nasehat, arahan dan idenya.
- Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 khususnya Ilmu Pemerintahan yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku dalam keadaan apapun.
- Almamaterku yang selalu ku banggakan "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM".

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(Studi Kasus di PDAM Giri Menang)**



Oleh :

AHMAD FIKRI

216130119T

Menyetujui Mataram, 21 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

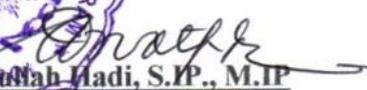

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua




Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh : **Ahmad Fikri**
NIM : **216130119T**
JudulSkripsi : **Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Dengan Pemerintah Kota Mataram Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Kasus di PDAM Giri Menang).**

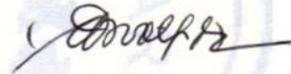
Telah disetujui oleh dewan penguji skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Mataram, 21 Agustus 2020

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.Ip., M.Si (PU)
NIDN. 0825038303



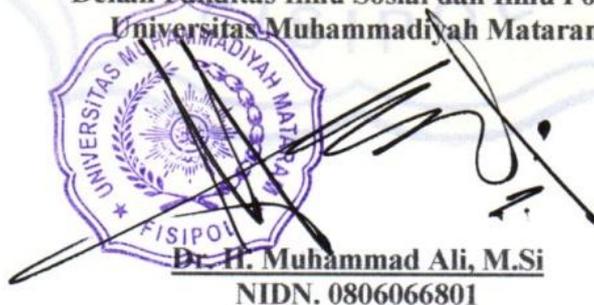
Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP (PP)
NIDN. 0816057902



Drs. H. Darmansyah, M.Si (PN)
NIDN. 0008075914



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **Ahmad Fikri**

NIM : **216130119T**

Judul Skripsi : **Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Dengan Pemerintah Kota Mataram Dalam Pengelolaan Sumber daya air (Studi Kasus PDAM Giri Menang).**

menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan dipergunakan untuk menyelesaikan program Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di Universitas Muhammadiyah Mataram dan belum pernah dipergunakan di program lain di lembaga manapun juga. Hasil karya orang lain yang saya kutip didalamnya telah di dokumentasikan sebagaimana mestinya pada bagian daftar pustaka.

Mataram, 21 Agustus 2020

Penyusun



AHMAD FIKRI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fikri
NIM : 210130119T
Tempat/Tgl Lahir : Mataram 13 Maret 1994
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081936610093 / fikryahmad@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
(Studi kasus PDAM Giri Menang)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Rabu 16 September 2020

Penulis



Ahmad Fikri

NIM. 210130119T

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Meskipun Aku Diam Tenang Bagai Ikan, Tapi aku Gelisah pula Bagai Ombak Dalam Lautan dan Angin Saat Fajar memiliki Rahasia Untuk Memberitahu Anda Jangan Kembali Tidur”. (Jalalludin Rumi)

“semua agama dirancang untuk mengajarkan kita bagaimana untuk hidup sukacita, tenang , ramah, ditengah-tengah penderitaan”. (Karen Amstrong)

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT DENGAN PEMERINTAH KOTA
MATARAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERIODE 2019/2020 (STUDI KASUS DI PDAM GIRI
MENANG MATARAM)**

ABSTRAK

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi. Konsep mengenai ketersediaan dan kebutuhan air perlu di pahami dengan baik agar pola penggunaan air atau manajemen dapat baik pula sehingga hal-hal negatif seperti krisis air, banjir, kekeringan, maupun dampak lainnya setidaknya dapat di reduksi. Kolaborasi adalah kerjasama stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Huxham dan Siv Vangen (1996:5-17) mengemukakan sedikitnya enam hal dalam proses kolaborasi antar organisasi. Ke-enam hal tersebut adalah; (1) managing aims, (2) compromise, (3) communication, (4) democracy and equality, (5) power and trust, dan (6) determination commitment and stamina. PDAM giri Menang yang pertama di Indonesia dimiliki oleh dua Pemerintahan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan pemerintah Daerah Kota mataram. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analitis, kolaborasi, pengelolaan, sumber daya air menjadi kunci penelitian, dimana lokasi penelitian di PDAM Giri Menang Mataram. Pengambilan data berdasarkan data primer dan data sekunder, meliputi wawancara dan dokumentasi. Kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Lombok barat dan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan sumber daya air dengan tujuan mendistribusikan air bersih di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram. Untuk mewujudkan kearah kerjasama penuh atau formal antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dengan meningkatkan hubungan kolaborasi, hubungan koordinasi dan meningkatkan kerjasama penuh dalam pengelolaan sumber daya air.

Kata Kunci : *Kolaborasi, pengelolaan sumber Daya Air, Pemerintah Daerah*

**THE REGIONAL GOVERNMENT COLLABORATION BETWEEN WEST
LOMBOK AND MATARAM CITY IN THE WATER MANAGEMENT
RESOURCES FOR THE 2019/2020 PERIOD**

(CASE STUDY IN PDAM GIRI MENANG MATARAM)

ABSTRACT

Water is a source of life that is a necessity by all creatures on earth. The management of water supply and demand should be well understood to make the usage patterns of water that can be well-managed. Thus, the negative things such as water crises, floods, drought, and other impacts can be reduced. Collaboration is the cooperation between stakeholders of government administration to solve problems in society. According to Huxham and Siv Vangen (1996: 5-17), they state that there are six points in the collaboration process between organizations. Those are; (1) managing aims, (2) compromise, (3) communication, (4) democracy and equality, (5) power and trust, and (6) determination of commitment and stamina. Two Governments own the first PDAM Giri Menang in Indonesia; they are the West Lombok and the Mataram City Regional Government. This research used descriptive-analytical, collaboration, management, and water resources are the keywords of research. This research is located in PDAM Giri Menang Mataram. The data collection is based on primary and secondary data, including interviews and documentation. The collaboration between the West Lombok and the Mataram City Government in water resources management to distribute clean water in both areas, already achieve the full-agreement or formal cooperation between the West Lombok Regency Government and the City of Mataram by increasing collaborative relationships, coordination relationships and increasing full cooperation in water resources management.

Keywords: Collaboration, Water Resources Management, Local Government

MENGESAHKAN
CALIRAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT PDS
UNIVERSITAS MATARAM

Humaira
Humaira, M.Pd

NIDN. 0803048601

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2019**“ tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penelitian proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materi sehingga proposal ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak LaluSopanTirtaKusuma S.IP., M.SI, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan
4. Bapak Ayatullah Hadi. S.Ip., M.I.P, selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan dan merangkul sebagai pembimbing kedua, terima kasih atas bimbingannya selama ini yang membimbing peneliti dengan rasa sabar dan teliti.
5. Teruntuk orang tua dan keluarga besar Hamid family terima kasih atas do'a dan dukungannya, dorongan semangat dan motivasi yang telah diberikan selama ini dan lebih khususnya ketika penulis menyusun proposal penelitian skripsi ini

6. Untuk temen-teman yg telah menginjakkan kakinya di rumah acenk, terima kasih telah memberikan curhatan mendalam dan keluh kesah kalian.
7. Kemudian untuk teman-teman KKN Desa Selengen Kabupaten Lombok Utara kelompok 12.
8. Dan yang terakhir untuk peneliti sendiri Ahmad Fikri yang telah berjuang melawan kemalasan ketika penggarapan proposal berlangsung.

Mungkin penulisan berusaha menyelesaikan proposal penelitian ini sebaik mungkin. Penulis menadari bahwa proposal penelitian ini masih banyak kekurangan.oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram 8 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian.....	6
A. Manfaat Akademis	6
B. Manfaat Teoritis	6
C. Manfaat praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori	12
A. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	12
B. Collaborative Governance	15
C. Proses Kolaborasi Antar Organisasi	18
D. Prasyarat, Faktor Pendukung, dan Penghambat Kolaborasi	20
E. Model-Model Kolaborasi	23
F. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	27
2.3 PDAM.....	30
2.4 Kerangka Pemikiran	32
2.5 Definisi Konseptual	32
2.6 Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Lokasi Penelitian	34
3.2 Pendekatan Penelitian.....	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengambilan Data	36
3.5 Teknik Analisa Data	38
3.6 Metode Penentuan Responden	39
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	40
BAB VI Hasil dan Pembahasan	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

4.2 Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram	51
1. Managing Aims.....	51
a. Tujuan Kolaborasi	51
b. Penjabaran Kepentingan	62
1. Kepemilikan Saham	62
2. Keuntungan Kepada Masing-Masing Daerah.....	65
2. Compromise	66
a. Menciptakan Kesepakatan Jalan tengah	66
BAB V Penutup	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Rintangan-Rintangan Kolaborasi Antar Organisasi	21
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Uraian Direksi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap	50
Tabel 4.2 Pengembangan Infrastruktur Pelayanan PDAM Giri Menang	53
Tabel 4.3 Anggaran Perpipaian Distribusi Penyediaan Air Minum PDAM Giri Menang Pertahun.....	54
Tabel 4.4 Perkembangan Aspek Operasional PDAM Giri Menang	56
Tabel 4.5 Data Bangunan Pengambilan (Boncaptering) Air Baku Kabupaten Lombok Barat.....	60
Tabel 4.6 Konflik Kepentingan Internal PDAM Giri Menang Yang Memerlukan Penyelesain Jalan Tengah.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kolaborasi Agranof-McGuire.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Teori	32
Gambar 3.2 Model studi Kasus	35
Gambar 4.1 Bentuk Logo Beserta Arti dan Makna	44
Gambar 4.2 Stuktur Organisasi PPDAM Giri Menang	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi, baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun menopang hidupnya secara alami. Secara ekologis, air juga merupakan salah satu indikator utama dalam pengelolaan lingkungan karena keberadaan air menjamin bekerjanya siklus alam secara normal. Kegunaan air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadi semakin berharganya air baik jika dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Air di bumi sekitar 95,1 % adalah air asin sedangkan 4,9 % berupa air tawar. Hal ini tentu saja menjadi perhatian yang sangat penting mengingat keberadaan air yang biasa di manfaatkan terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga perlu suatu pengelolaan yang baik agar air dapat di manfaatkan secara lestari.

Pemanfaatan air tentu akan sangat berkaitan dengan ketersediaan dan jenis pemanfaatan seperti pemanfaatan untuk irigasi, perikanan, pertanian, peternakan, industri, dan lain-lain. Adanya berbagai kepentingan dalam pemanfaatan air dapat menimbulkan terjadinya konflik baik dalam penggunaan airnya maupun cara memperolehnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka persaingan untuk

mendapatkan air untuk berbagai macam kepentingan pun terus meningkat.

Konsep mengenai ketersediaan dan kebutuhan air perlu di pahami dengan baik agar pola penggunaan air atau manajemen dapat baik pula sehingga hal-hal negatif seperti krisis air, banjir, kekeringan, maupun dampak lainnya setidaknya dapat di reduksi. Untuk itu, evaluasi sumber daya air (SDA) sangat penting dilakukan agar semua potensi air yang ada dapat di inventarisasi dan di hitung ketersediaannya dan juga menghitung kebutuhan air sehingga dapat di upayakan sebuah rencana yang ideal agar kebutuhan manusia terpenuhi dan ketersediaan air tetap terjaga.

Dengan makin berkembangnya populasi penduduk di seluruh dunia ini akan juga berkembang jumlah maupun jenis pemanfaatan akan sumber daya air untuk mencukupi pola kehidupan yang akan maju mengikuti kemajuan peradaban. Ini akan membuat makin kompleksnya persoalan yang menyangkut penyediaan SDA. Hingga kini, SDAberfokus hampir secara eksklusif untuk orang-orang tertentu, sehingga air masih sulit di akses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan SDA, sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya, tidak lepas dari perkembangan yang terjadi pada tatanan pemerintah kita yang sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber

daya air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan SDA oleh negara untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Dengan terbitnya Undang-undang No.22 Tahun 2009 dan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya pengaturan SDA.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pemanfaatan sumber daya air di daerah termasuk di Kota Bandar Lampung meliputi kebutuhan domestik penduduk, industri, pertanian, dan penggunaan lainnya. Secara kuantitas, kebutuhan air masih dapat dipenuhi dari cadangan yang ada. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air selama ini, tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh masyarakat masih jauh dari tercapai. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan maka kebutuhan air juga akan semakin meningkat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Distribusi air ledeng yang tidak merata menyebabkan masyarakat lebih memilih membuat sumur bor sendiri, sehingga jumlah konsumen yang menggunakan sumber air tanah (di luar PDAM) semakin meningkat. Jumlah pengguna sumur bor yang meningkat mengakibatkan membuat sumur gali (air tanah dangkal) yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah lebih cepat mengering pada musim kemarau, sehingga menyebabkan beberapa tempat sering mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dibutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Praktik implementasi dengan melibatkan ragam stakeholders memang membutuhkan beberapa prasyarat, seperti jejaring yang kuat, tingkat kepercayaan yang memadai, hingga akuntabilitas dari masing-masing aktor. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan sistem kelembagaan partisipatif adalah melalui pendekatan collaborative governance. Dengan pendekatan collaborative governance maka sistem kelembagaan akan lebih mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan juga menciptakan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan program-program berbasis masyarakat.

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya tapi juga sistem kelembagaan di masyarakat. Studi tentang kinerja dan manajemen suatu program atau kebijakan dengan mengadopsi perspektif kelembagaan telah tumbuh dan berkembang selama dekade terakhir ini. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Modell (2009), Adolfsson & Wikstro (2007) dan Polk (2011).

Pengelolaan SDA di Kabupaten Lombok Barat diharapkan tidak hanya sebagai pelestarian ekosistem (Yusnita, 2010) namun juga sebagai upaya untuk menjaga kualitas air untuk kebutuhan masyarakat (Supriyono, 2018). Oleh karena itu perlunya dukungan para stakeholder baik pemerintah, swasta, masyarakat dan pemerintahan terkait yaitu pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat begitu pentingnya kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Tetapi menghadapi ketidakseimbangan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan efektif memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, akhirnya dapat di tentukan rumusan masalah yaitu Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan Sumber Daya Air?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan sumber Daya Air?

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Program Studi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020.

B. Manfaat Teoritis

Agar dapat membangun pemahaman mengenai *Collaborative Governance* atau kerjasama yg dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA.

C. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang berarti bagi pemerintah daerah dalam kolaborasi didalam mengelola SDA dan sebagai bahan masukan bagi tiap sektor atau stakeholder yang terlibat dalam kerjasama pengelolaan SDA tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/ta hun	Judul	Met ode	Persamaan dan perbedaan
	Denok Kurniasih,dkk/ 2017	<i>Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas,</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Penelitian ini Sama - sama menggunakan metode penelitian kualitatif - Perbedaan variabel penelitian terdahulu melihat dari Identifikasi Proses <i>Face To Face</i> Dalam Pelaksanaan Program SLBM, (2) Identifikasi Proses Negosiasi dalam Pelaksanaan Program SLBM, dan (3) Identifikasi Proses Konsensus dalam Sistem Kelembagaan, sedangkan peneliti melihat dari dua indikator yaitu <i>managing aims</i> dan <i>compromise</i>
	Grandy Loranessa dan	<i>Model Kelembagaan</i>	Kual	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Penelitian ini Sama-sama

.	Hadi Wahyono / 2017	<i>Pemafaatan Sumber Daya Air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang</i>	itatif	menggunakan metode penelitian kualitatif - Perbedaan variabel penelitian terdahulu melihat stakeholder yang terlibat, goals/kepentingan, kerangka regulasi, struktur kelembagaan, hubungan kerjasama, dan bentuk perjanjian kerjasama kelembagaan, sedangkan peneliti melihat dari dua indikator yaitu <i>managing aims</i> dan <i>compromise</i>
.	Harmiati, dkk/2018	<i>Implementasi good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu</i>	Kualitatif	- Lokasi - Penelitian ini Sama - sama menggunakan metode penelitian kualitatif - Perbedaan variabel penelitian terdahulu melihat dari proses kolaborasi, transparansi kelembagaan dan aturan(<i>rule of law</i>) sedangkan peneliti melihat dari dua indikator yaitu <i>managing aims</i> dan <i>compromise</i>
.	Faqih Alfian dan Dian Vitaloka /2018	<i>Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)</i>	Kualitatif	- Lokasi - Penelitian ini Sama - sama menggunakan metode penelitian kualitatif - Perbedaan variabel penelitian terdahulu melihat dari proses kolaborasi dan produk kerjasama antar pemerintah sedangkan peneliti melihat dari dua indikator yaitu <i>managing aims</i> dan <i>compromise</i>
.	Meyka Permata Sari/ 2019	<i>Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang</i>	Kualitatif	- Lokasi - Penelitian ini Sama - sama menggunakan metode penelitian kualitatif - Perbedaan variabel penelitian terdahulu melihat dari desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi, sedangkan peneliti melihat dari dua indikator yaitu <i>managing aims</i> dan

		Kabupaten Lampung Selatan		<i>compromise</i>
--	--	------------------------------	--	-------------------

Denok Kurniasih, Paulus Setrawan Setyoko, dan Moh. Imron (2017) *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas*, menyarankan dalam penelitiannya untuk Upaya penguatan kelembagaan ke arah interaksi sosial melalui kerjasama kolaboratif di antara segenap *stakeholders* penting dilakukan untuk membuat pelaksanaan program berbasis masyarakat lebih efektif sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian kemanfaatan program akan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Nilai lebih dari model kelembagaan *collaborative* antara lain karena model ini mampu memperkuat sistem jejaring dan arus informasi serta mengurangi ketidak sepahaman antar *stakeholders*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Cresswell, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dengan berbagai *stakeholders* serta wawancara mendalam dengan informan penting dalam program SLBM (pemerintah daerah), yang diwakili oleh Dinas Ciptakarya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kontraktor pelaksana tender dan tokoh masyarakat). Setelah data terkumpul dilakukan analisis data melalui metode interaktif (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

Grandy Loranessa dan Hadi Wahyono (2017) dalam penelitian yang berjudul *Model Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang* disimpulkan bahwa keterikatan

suatu kelembagaan dalam suatu perjanjian sangat mempengaruhi bentuk kelembagaan yang ada. Yang kedua tujuan Oleh karena itu diperlukan suatu perjanjian yang legal yang disepakati dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang jelas sehingga bentuk kelembagaan dalam pemanfaatan sumber daya air Muncul dapat berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan interaksi kelembagaan yang lebih baik agar dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air Muncul tetap terjaga.

Forum kerjasama menjadi alternatif yang tepat sebagai bentuk interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul karena forum ini memiliki bentuk perjanjian/TUPOKSI yang jelas dengan sanksi yang berlandaskan hukum negara dengan pengambilan kebijakan yang bersifat top down dan bottom up yang artinya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan konservasi sumber air Muncul menjadi hal yang utama, sehingga tujuan dalam pengembangan sektor pariwisata dan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dapat berjalan baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan survei primer dan sekunder. Survei primer meliputi wawancara dan observasi lapangan yang kemudian diolah dengan mendeskripsikan ke dalam deskripsi yang dapat dimengerti, sedangkan survei sekunder meliputi survei literatur dan survei instansi terkait. Teknik sampling yang digunakan *snowball sampling*.

Harmiati, dkk (2018) *Implementasi good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu* bertujuan untuk

mengetahui upaya dan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat Kabupten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan daerah Aliran sungai Bengkulu, sehingga terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Data di kumpulkan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Faqih Alfian dan Dian Vitaloka (2018) *Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)* menyarankan bentuk dari degradasi lingkungan dan kurang optimalnya pengelolaan DAS ciliwung yang di lakukan oleh antar pemerintah daerah. Di simpulkan bahwa permasalahan pada kelembagaan DAS ciliwung adalah perbedaan kepentingan antar daerah yang menghambat terjadinya pengelolaan DAS ciliwung secara terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak di peroleh dari melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara hoistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitisebagai instrument kunci.

Meyka Permata Sari (2019) *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan* melihat pada tahap kondisi awal masih terbatasnya SDA dan SDM, terbatasnya insentif bagi Tenaga Kerja, *desain* kelembagaan sudah berjalan baik, kepemimpinan sudah berjalan baik, proses kolaborasi meliputi *face to face* belum berjalan baik sebab

dilaksanakan hanya pada antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam kolaborasi. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan serta beberapa faktor pendukung namun praktek *collaborative governance* sudah dapat diterapkan dalam pengembangan objek wisata *Horti Park* Lampung. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan peneliti adalah Triangulasi dengan cara melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, PT. Primasid Andalan Utama, PT. Ewindo, THL, masyarakat dan perguruan tinggi. Peneliti melakukan metode triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.

2.2 Landasan Teori

A. Undang- Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Adanya pembagian 3 urusan ini menimbulkan hubungan yang baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apalagi dalam pelaksanaannya ada skala prioritas urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pembagian

urusan kewenangan tersebut dikontrol oleh pemerintah pusat dengan menerapkan norma, prosedur, standar dan kriteria (NPSK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketentuan umum dalam pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Konsep Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi. Sedangkan pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintahan daerah menjalankan

otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

B. Collaborative Governance

Secara epistemologi, kata *kolaborasi* berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *'co-labour'* bekerja bersama. Pada abad ke 19 (Sembilan belas) kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wann, 2008: 3)

Berbagai kerjasama antara *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat merupakan suatu upaya karena keterbatasan akan sumber daya dalam menanganinya. Istilah kerjasama antar stakeholder yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*.

Adapun definisi menurut para ahli Ansell and Gash dalam (Ansell dan Alison 2007:543) menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*.

Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan

bersama. Menurut O’Flynn dan Wanna (2007:543) mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi, dimana hal tersebut sangat bervariasi.

Kata “*collaboration*” pada awalnya digunakan pada abad ke Sembilan belas dalam perkembangan industrialisasi, dan pembagian kerja yang kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalism sosial, kolektivisme saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (O’Flynn dan John, 2008:3)

Donahue dan Zeckhauser mengartikan “*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent.*” (Donahue dan Richard, 2011:30) Artinya bahwa pemerintahan kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana.

Menurut Agranoff & McGuire (Chang, 2009:76-77) sebagai berikut:

In particular collaborative governance has put much emphasis on voluntary collaboration and horizontal relationships among multi-sectoral participant, since demands from clients often transcend and the capacity and role of a single public organization, and require interaction among a wide range of organizations that are linked and engaged in public activities. Collaboration is necessary to enable governance to be structured so as to effectively meet the increasing demand that arises from managing across governmental, organizational, and sectoral boundaries.

(secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi diantara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif dan memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral). Konsep ini memberikan penekanan hubungan kolaborasi yang sukarela dan horizontal sedangkan dalam realita kolaborasi yang terbentuk karena saling mendukung dan melengkapi dalam mengelola permasalahan publik.

Sedangkan menurut Culpepper (Sranko (2011:211) definisinya adalah:

collaborative governance is the the availability of institution that promote interaction among governmental actors, without state actors monopolizing problem definition, goal-setting, or methods of implementation. (Colaborative governance)

adalah ketersediaan institusi yang mempromosikan interaksi antara pemerintah dan non-aktor pemerintah tanpa aktor-aktor Negara memonopoli pendefinisian masalah, penetapan tujuan, atau model pelaksanaan). Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri apabila pemerintah menjadi leader dan pembuat kebijakan sehingga ada kemungkinan lebih mendominasi dan masih membutuhkan partisipasi dari stakeholders lain.

Menurut Tang & Masmanian (2008:5) mendefinisikan *collaborative governance*:

A concept that describes the process of estabilizing, stering, facilitating, and monitoring cross-sectoral organizational arrangement to address public policy problems that cannot be easily addressed by single organization or the public sector alone These arrangement are characterized by join efforts, reciprocal expectation, and voluntary participation among formally autonomous entities, from two or more sector-public, for profit, and nonprofits-in order to leverage (build on) the unique attributes and resources of each. (collaborative governance)

sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sektor publik sendiri. Pengaturan ini ditandai dengan upaya bergabung, harapan timbale balik, dan partisipasi sukarela antara entitas otonom resmi, dari dua atau lebih sektor-publik, profit dan nonprofit dalam rangka meningkatkan (membangun) atribut unik dan sumber daya dari

masing-masing). Definisi Tang dan Masmanian menekankan pada penyelesaian masalah public dengan melibatkan dua atau lebih sektor publik profit dan nonprofit.

Menurut Fosler (Dwiyanto, 2010:261) menjelaskan konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (shared vision) dan berusaha mewujudkan secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertical mulai dari sasaran strategi sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakin lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Sedangkan menurut sudarmo (2011:102-104) pada umumnya, *collaboration* dipandang sebagai respon organisasi terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran bisa dalam bentuk jumlah aktor kebijakan meningkat, isu-isu semakin meluas keluar batas-batas normal, kapasitas diluar pemerintah daerah atau kota dan pemerintah pusat umumnya semakin meningkat, dan inisiatif spontan masyarakat semakin meluas. Ketika pergeseran-pergeseran tersebut terjadi, maka hal ini bisa dirasakan bahwa pemerintah memiliki pilihan terbatas atau kecil dan bahkan seakan dipaksa untuk

mengikuti untuk segera menyelesaikan atau mengatasi apa yang tengah menjadi isu tersebut; namun demikian pemerintah harus tetap menyesuaikan dan membuat dirinya tetap relevan dengan lingkungan yang tengah bergejolak atau berubah.

C. Proses Kolaborasi Antar Organisasi

Huxham dan Siv Vangen (1996:5-17) mengemukakan sedikitnya enam hal dalam proses kolaborasi antar organisasi. Keenam hal tersebut adalah; (a) *managing aims*, (b) *compromise*, (c) *communication*, (d) *democracy and equality*, (e) *power and trust*, dan (f) *determination commitment and stamina*.

1. Managing Aims

Aims goals atau *objective* (tujuan) merupakan alasan utama suatu kolaborasi terjadi (*why the collaboration exists & why they are part of it*). Ada tiga level tujuan yang diusulkan Huxham dan Vangen, yaitu (1) “*meta goals*” pada *top level*, suatu pernyataan eksplisit tentang tujuan yang ingin dicapai; (2) penjabaran kepentingan yang ingin dicapai tiap organisasi yang terlibat; (3) penjabaran tujuan individu dari setiap organisasi.

2. Compromise

Kompromi dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, kultur, gaya kerja individu, dan nilai organisasi. Kompromi dilakukan dengan cara menciptakan jalan tengah yang mengakomodasikan pihak lain dan menghilangkan persepsi *stereotype* terhadap pihak lain.

3. Communication

Bahasa merupakan isu utama komunikasi dalam kolaborasi yang harus disesuaikan dengan konteks, profesi, etnik, bahasa resmi. Komunikasi yang efektif dapat menghindari makna ganda atas satu kosakata yang sama serta memahami apa yang diinginkan pihak lain. Dalam perspektif *common pool good* atau *common pool resources*, komunikasi menjadi menjadi salah satu alat untuk menghindari *tragedy of the common* seperti dinyatakan Shu Yan Tang bahwa

tragedy of the common terjadi karena pihak –pihak menghadapi *commons* dilemma kesulitan komunikasi.

4. *Democracy dan Equality*

Dalam kolaborasi ada tiga aspek demokrasi yang harus diperhatikan; pertama, siapa yang harus dilibatkan dalam kolaborasi. Kedua, proses kolaborasi yaitu kesejajaran dan penghargaan atas setiap orang. Ketiga, akuntabilitas dan keterwakilan dalam bentuk pertanggung jawaban atas organisasi dan konsituen.

5. *Power and Trust*

Power and trust secara psikologis digunakan untuk mengatasi perasaan “rendah diri” komunitas lokal dan sekaligus menekan perasaan “tinggi hati” lembaga pemerintah dan institusi global. *Power and trust* diilustrasikan “sebuah organisasi pemerinatah sebagai penyandang dana dan tenaga ahli dalam kolaborasi. Sedangkan kelompok kecil suatu komunitas menyumbangkan keahlian penting dalam bentuk pengetahuan lokal”. *Trust* secara ideologis juga digunakan sebagai alat kontrol terhadap prilaku. Dalam keadaan struktur situasi sulit dalam mengendalikan prilaku, *trust* merupakan alat yang efektif.

6. *Determination, Commitment, dan Stamina*

Dalam berkolaborasi sering terjadi *collaborative inertia*, yaitu suatu situasi kolaborasi yang tak seimbang (satu pihak berpengalaman, yang satu pihak belum berpengalaman) sehingga tujuan kolaborasi sulit dicapai. Situasi ini diatasi dengan komitmen. Komitmen itu sendiri tergantung kepada seberapa dekat agenda mereka *matching* dalam program kolaborasi, determination (manfaat keberlanjutan kerjasama), dan ketugahan hati (*stamina*) untuk tetap berkolaborasi.

D. Prasyarat, Faktor Pendukung, dan Penghambat Kolaborasi

Kolaborasi tidak didasarkan pada paradigam otoritas legal karena karena tidak ada ikatan hukum. Pertanyaan yang muncul, mengapa para stakeholder datang, duduk satu meja, bekerja sama, mengadakan kesepakatan, dan melaksanakan kolaborasi.

Red dan Cedja, sebagaimana dikutip *Bradshaw* (161-162), menjelaskan prasyarat atau prakondisi organisasi yang mendukung keberhasilan kolaborasi;

- *Linked organizational objectives that foster mutual goal attainment*
- *Comprehensive preassessment of value commodities*
- *Organizational values that promote interdependence*
- *Environmental scanning and strategic planning*
- *Administrative commitment, knowledge, and support*

Prakondisi tersebut harus diimbangi dengan investasi energy sebagai tahapan awal program dan program kegiatan yang terkait. Investasi energi dilakukan sejak penentuan masalah (*problem setting*), penentuan tujuan (*direction setting*) dan pelaksanaan (*structuring*).

Tahapan tersebut berjalan secara incremental, namun dalam praktiknya lebih berbentuk spiral dari pada dalam sebuah garis lurus. Konsekuensinya, setiap mitra harus senantiasa menyeimbangkan focus jangka panjang dengan kelenturan cara efektif yang ditemukan diperjalanan. Hal ini perlu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, ketersediaan sumber daya dan preferensi serta kemampuan kolektif stakeholder mengelola perubahan.

Pada pihak lain *Agranof dan Mc Guire*(2003:141-150) menyatakan ada empat penguat ikatan (kohesivitas) pertama trust, tujuan bersama dan saling ketergantungan, relasi ketergantungan sumber, lingkungan dan pertukaran sumber daya yang menjadikan satu dengan yang lainnya interpenden; kedua, shared belief and common purpose, sebagai pegangan kolaborasi, ketiga, mindset dan komitmen yang menggantikan metode tradisional

yang tidak berjalan; keempat, kepemimpinan dan memandu menggantikan cara komando dan kontrol.

Adapun faktor penghambat dan rintangan kolaborasi antara lain, (1) keengganan berbagi dengan orang lain yang tidak dikenal; (2) keengganan menerima cara pemecahan masalah yang diberikan pihak lain; (3) keengganan berbagi pengetahuan karena pengetahuan merupakan sumber kekuasaan; (4) solusi bukan produk kelompok sendiri, tetapi datang dari luar. Adapun rintangan dalam kolaborasi antarorganisasi bersifat internal-eksternal dan organisasional-teknikal dan politis. Terlihat pada table berikut:

Tabel 2.2
Rintangan-Rintangan kolaborasi antar organisasi

	Sifat Rintangan		
Domain	Organisasi	Tekhnis	Politik
Internal	Perbedaan misi, orientasi profesional, struktur, dan proses	Perbedaan kapasitas dan teknologi yang diterapkan	Proteksi terhadap tumbuhny a kolaborasi
Eksternal	Kurangnya dukungan pemimpin	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum yang ketat dan aturan program yang mengikat • Berbagai pembatasan dalam penggunaan dana • Kecendrungan ekonomi 	Tekanan dari kelompok konstituen

Sumber: *Durado, Silvia and Peter Vaz, 2003*

Kesukaran dan masalah yang ditemukan dalam strategi kolaborasi dikemukakan oleh Limerick dan cunnington. Pertama, tujuan ambigu sehingga lingkup dan batas-batas tujuan bersama sulit didefinisikan. Dalam kolaborasi diantara organisasi yang berdaulat tujuan yang berbeda harus direkonsiliasi ke tujuan bersama dan ketika ini tidak tercapai, tujuan bersama justru menjadi sumber konflik. Kedua, kedaulatan setiap unit organisasi yang interpenden yang relatif sulit dikelola. Ketiga, kondisi dari setiap mitra yang a-simetris sehingga input, kontribusi atau output setiap mitra tidak sama.

Keadaan ini dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh mitra yang kuat sehingga *trust* menjadi hancur. Keempat, terbentuknya pesaing potensial berupa alih teknologi yang diserap oleh mitra lain. Dalam jangka panjang mitra yang telah menyerap alih teknologi akan menjelma menjadi pesaing potensial. Kelima, fokus jangka pendek, khususnya masalah finansial, menimbulkan kesulitan dalam membangun kepercayaan dan mengancam pengembangan norma, kepercayaan, dan nilai-nilai bersama. Keenam, kebutuhan komunikasi intensif, cepat dan canggih antar mitra yang relative sulit dipenuhi karena kondisi setiap mitra yang a-simetris. Ketujuh, perbedaan kultur yang menimbulkan kesulitan mengelola *network*.

E. Model-Model Kolaborasi

Sebelum mengemukakan model-model kolaborasi, penulis, penulis akan memaparkan beberapa pengertian model. Hal ini penting dikemukakan untuk menghindari persepsi yang salah tentang model. Selama ini model selalu identik dengan dengan model-model persamaan (model matematika), model sebagai prototipe tertentu (model teknis). Model memiliki jenis dan bentuk yang bermacam-macam sebagaimana akan diuraikan dalam paparan pengertian model.

Model adalah abstraksi dunia nyata, substitusi, atau representasi realita dalam bentuk peta, diagram organisasi, persamaan matematika, dan lain-lain. Model digunakan untuk membantu saat berhadapan dengan fenomena nyata yang kompleks dan mahal jika dikaji secara langsung. Model merupakan cara alamiah memperoleh gambaran dunia nyata dengan mempelajari replika yang mencerminkan fenomena.

Model dapat dilaksanakan (1) model eksplisit eksplanatoris-prediktif yang mendeskripsikan gambaran suatu dunia nyata; (2) model implisit yang bersifat mental (mental model). Beberapa klarifikasi model yang termasuk ke dalam model yang eksplanatoris-prediktif adalah modal analitis, model simulasi, gaming model, model judgment, model skematik, dan model fisik.

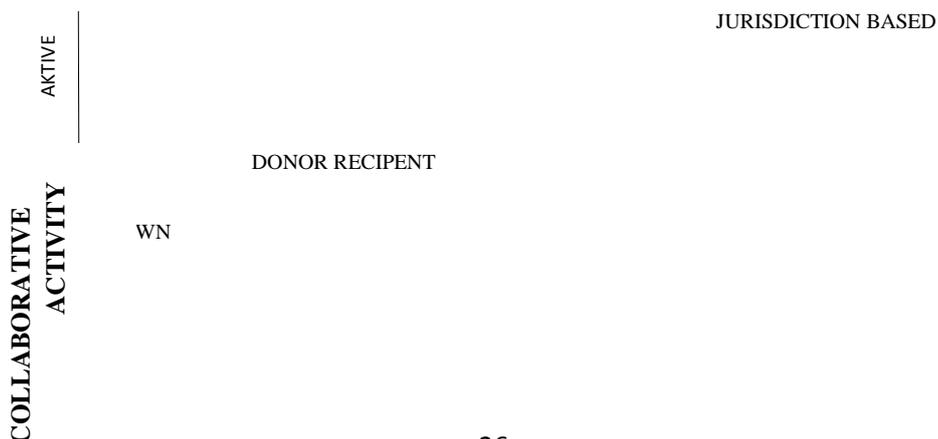
Siffin mengemukakan pentingnya suatu model dalam memetakan keadaan lingkungan dengan cara menyederhanakannya;

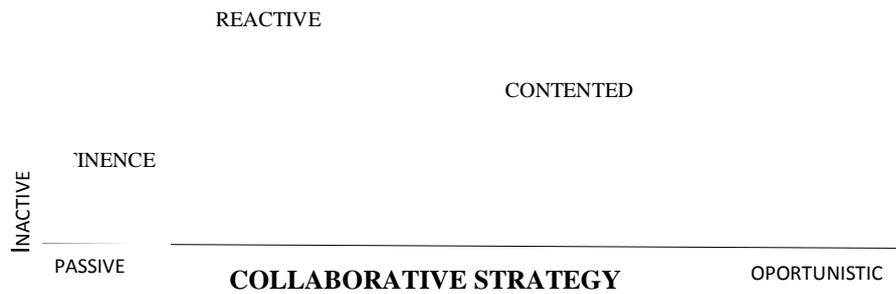
“...Kebutuhan untuk memetakan suatu lingkungan dengan mengidentifikasi hal-hal yang penting dan kurang penting, mencari pemahaman dan menghasilkan pandangan yang disederhanakan dari suatu keadaan secara empiris belum lengkap dapat dikatakan sedang mencari atau membuat model berupa analogi statis, sedangkan model dinamis bila keadaan-keadaan diberikan indikasi bagaimana keadaan itu saling berinteraksi”.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, kolaborasi dibutuhkan seiring dengan munculnya interdependensi antar aktor atau organisasi. Semakin besar interpendensi selanjutnya mendorong meningkatnya frekuensi dan intensitas komunikasi antar organisasi diwujudkan dalam keputusan dan tindakan yang dibuat bersama dan dikerjakan secara kolektif.

Untuk memetakan interdependensi tersebut, model kolaborasi merupakan suatu citra mental yang mencoba menyederhanakan kompleksitas relasi antar organisasi. Dalam penyederhanaan tersebut diidentifikasi sejumlah dimensi yang membentuk relasi dan interaksi tersebut. Model Agranof-Mc guire didasarkan pada dua dimensi: aktivitas dan strategi. Kedua dimensi ini menghasilkan enam kombinasi model kolaborasi. Seperti pada gambar berikut ini

Gambar 2.1 Model kolaborasi Agranof-McGuire





Sumber:Agranof -Mc Guire, 2003

1. *Jurisdiction-Based Model*

Model ini dicirikan dengan aktivitas kolaborasi yang aktif (dimensi vertikal) dan kolaborasi yang bersifat oportunistik (dimensi horizontal). Dimensi vertikal merupakan interaksi aktivitas dan perilaku para aktor yang menganggap aktivitas dengan aktor lain sebagai dari pekerjaannya sendiri, dan negosiasi merupakan instrument penting pada model ini. Tawar-menawar menghasilkan konsesi *unilateral* dan *mutuality beneficial solution*.

Dimensi horizontal menjelaskan proses pembuatan kebijakan dan pengaturan (*governance*). Dalam aransmen tersebut tidak seorangpun memiliki power untuk menentukan strategi aktor lain karena masing-masing memiliki kebijakan strategi dan operasional sendiri-sendiri.

2. *Abstinence Model*

Model ini merupakan titik ekstrem dari *jurisdiction-based model* berupa ketidakmauan (*abstain*) untuk melakukan kolaborasi dan memilih tidakterlibat dalam berbagai program. Beberapa alasan

abstain (1) menolak “rembasan” campur tangan dari luar; (2) kurangnya kapabilitas dalam memainkan peran dalam game; (3) memilih *going it alone*.

Ada tiga aktor yang menyebabkan munculnya model kolaborasi *abstinence*, pertama; beberapa jurisdiksi berkeberatan adanya keterlibatan pemerintahan level atas dalam wilayah dan ruang politik mereka karena sebagai alasan, tantangan oposisi internal, tambahan beban kerja, keuangan, dan peraturan lainnya. Kedua; berkaitan dengan kelangkaan sumber daya, baik dari segi waktu maupun kemampuan personalia. Ketiga; beberapa jurisdiksi tak mau berkolaborasi, baik secara vertikal maupun horizontal karena memang tak mau terlibat.

3. *Top-down Model*

Model ini menekankan kontrol pemerintah pusat secara vertikal terhadap pemerintahan regional dan local. Program nasional pemerintah melalui pemerintahan local yang secara hukum bersifat independen. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dan menentukan model ini adalah ketaatan suka rela pemerintah local dalam melaksanakan program pemerintah pusat.

4. *Donor-Recieipient Model*

Model ini merupakan model moderat yang didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah aktor menguasai informasi dan keahlian

untuk mengontrol kebijakan yang konsisten dengan kepentingan sosial yang banyak tersebut. Model ini melibatkan *grantors* dan *grante* karena aktor-aktor dalam sistem kolaborasi saling tergantung pada yang lainnya. Ciri utama model ini adalah kolaborasi vertikal-horizontal yang minimal.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam model ini, yaitu kompromi, partisipasi pemecahan masalah, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Kelemahan dari program ini adalah program menjadi bertumpuk-tumpuk, complicated, dan sangat mahal.

5. *Reactive Model*

Model ini dicirikan dengan tidak adanya orientasi yang dominan dalam strategi atau aktivitas kolaborasi dan pendekatan yang digunakan adalah *maybe, maybe not*. Ada beberapa alasan strategis mengapa tak mau terlibat dalam kolaborasi. Pertama, prinsip otonomi dan integritas yurisdiksi sebagai suatu entitas dengan batas yang jelas. Setiap keputusan harus didasarkan pada preferensi warga bukan atas mandat atau dikte dari pemerintah yang lebih atas. Setiap rangsangan dari luar dilihat sebagai ancaman terhadap integritas organisasi. Kedua, justifikasi atas dikotomi politik administrasi sehingga setiap aktivitas antar pemerintah tidak diinginkan. Ketiga, aktivitas dalam kolaborasi bukan *mission driven* atau pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan lokal dan karenanya tidak harus dijadikan pertimbangan untuk

diikuti. Keempat, organisasi pemerintah lokal telah menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan kegiatan yang diselenggarakan dalam kolaborasi dan kalau diikuti akan terjadi tumpang tindih.

6. *Contented Model*

Model ini lebih menekankan strategi kolaborasi daripada aktivitas kolaborasi itu sendiri. Dengan kata lain, model ini lebih bersifat oportunistik dan berupaya mengeksploitasi lingkungan sesuai dengan preferensi pemerintahan lokal atau organisasi itu sendiri.

F. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Dalam pengelolaan DAS, terdapat terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut system aliran sungai. Di Amerika Serikat dikenal istilah watershed, di Inggris dikenal istilah *catchment area of river basin*. Di Indonesia sendiri dikenal (1) daerah aliran sungai (DAS) sebagai padanan *watershed* yang digunakan dalam ilmu kehutanan dan ekologi; (2) daerah pengairan sungai (DPS) sebagai padanan *river basin* yang digunakan dalam ilmu irigasi.

Dua pengertian yang dikemukakan diatas mengindikasikan bahwa pengelolaan DAS merupakan kegiatan yang tumpang tindih. Kegiatan tidak semata-mata berkaitan dengan pengelolaan air sungai, tetapi dengan berbagai aktivitas yang mempengaruhi keberadaan aliran air disepanjang aliran alira sungai tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan DAS merupakan kegiatan yang terpadu, dalam arti aktivitas maupun organisasi ang terlibat didalamnya.

Menurut *Hufschmidt*(1996:181-184) mengemukakan tiga prinsip dalam pengelolaan DAS (1) sebagai langkah perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah namun, berkaitan; (2) sebagai sistem perencanaan dan implementasi program pengelolaan DAS melalui kelembagaan yang relevan dan terkait; (3) sebagai aktivitas serial yang saling berkaitan. air, berangkat dari uraian Hufschmidt, kolaborasi dan pengelolaan DAS pada dasarnya adalah kerjasama antarorganisasi atau stakeholder yang relevan.

Pengelolaan DAS merupakan bentuk kegiatan yang bersifat publik dan melibatkan banyak stakeholder. Hal ini menempatkan pengelolaan DAS pada domain *public governance*. (1) warga negara sebagai individu, (2) organisasi kemasyarakatan, baik yang terorganisasi formal maupun tidak terorganisasi, (3) lembaga niraba, (4) dunia usaha, (5) media masa, (6) lembaga pemerintah lainnya.

Sedangkan *Grigg* (2005:185-187) mengemukakan stakeholder dalam pengelolaan DAS berikut peran dan tanggung jawab masing-masing pertama penyedia pelayanan (*service provider*), dilakukan oleh pemerintah, atau kemitraan pemerintah – swasta-stakeholder lainnya. Kedua pengatur (*regulator*), umumnya pemerintah. Ketiga perencana seperti konsultan, pemerintah, LSM, masyarakat setempat. Keempat organisasi pendukung seperti ahli-ahli teknik dan rekayasa dalam bidang SDA. Kelima para pemakai (*user*), yaitu semua stakeholder yang berkepentingan dalam suatu wilayah DAS, baik warga negara secara individual, perusahaan, kelompok-kelompok masyarakat dll.

Dalam perspektif konsep kolaborasi, pemerintah hanya salah satu stakeholder, tetapi memiliki tempat khusus yang tidak dimiliki aktor lain. Pertama pemerintah menguasai dan memiliki akses terhadap sumber daya, kekuasaan yang khusus, monopoli penggunaan kekuatan, dan legitimasi demokrasi. Kedua sebagai representasi masyarakat, pemerintah memiliki tugas khusus untuk melayani kepentingan publik, khususnya kepentingan pokok seperti

menjaga stabilitas dan keamanan, mendorong berfungsinya masyarakat, otoritas untuk menyelesaikan konflik sosial dan memelihara nilai-nilai sosial dan demokrasi. Ketiga, pemerintah berperan sebagai manajer jejaring kolaborasi, fasilitator proses interaksi atau mediator-arbitrator jika interaksi mengalami kemacetan.

Memperkuat paparan diatas *Korten* (2001:155-156) mengemukakan konseporganisasimultisektor yang kemudian disebut organisasi tiga pihak. Konsep ini mengacu kepada keberadaannya dalam melayani kebutuhan publik. Ketiga jenis organisasi tersebut penting bagi berfungsinya msyarakat. Pemerintah menjaga ketertiban umum, pembisnis memenuhi kebutuhan benda dan jasa. Sedangkan organisasi sukarela bertanggung jawab menyatukan rakyat dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah dan pembisnis.

2.3 PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat.

Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah Dalam hal ini keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan

ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan PDAM merupakan barang yang essential yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain dengan menjual air bersih ini PDAM diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi PAD. Dana dari PAD ini yang kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Maka sejalan dengan itu agar PDAM berjalan dengan tujuan dan fungsinya, memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya, dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unsur pelayanan publik, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun di balik fungsinya sebagai unsur pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

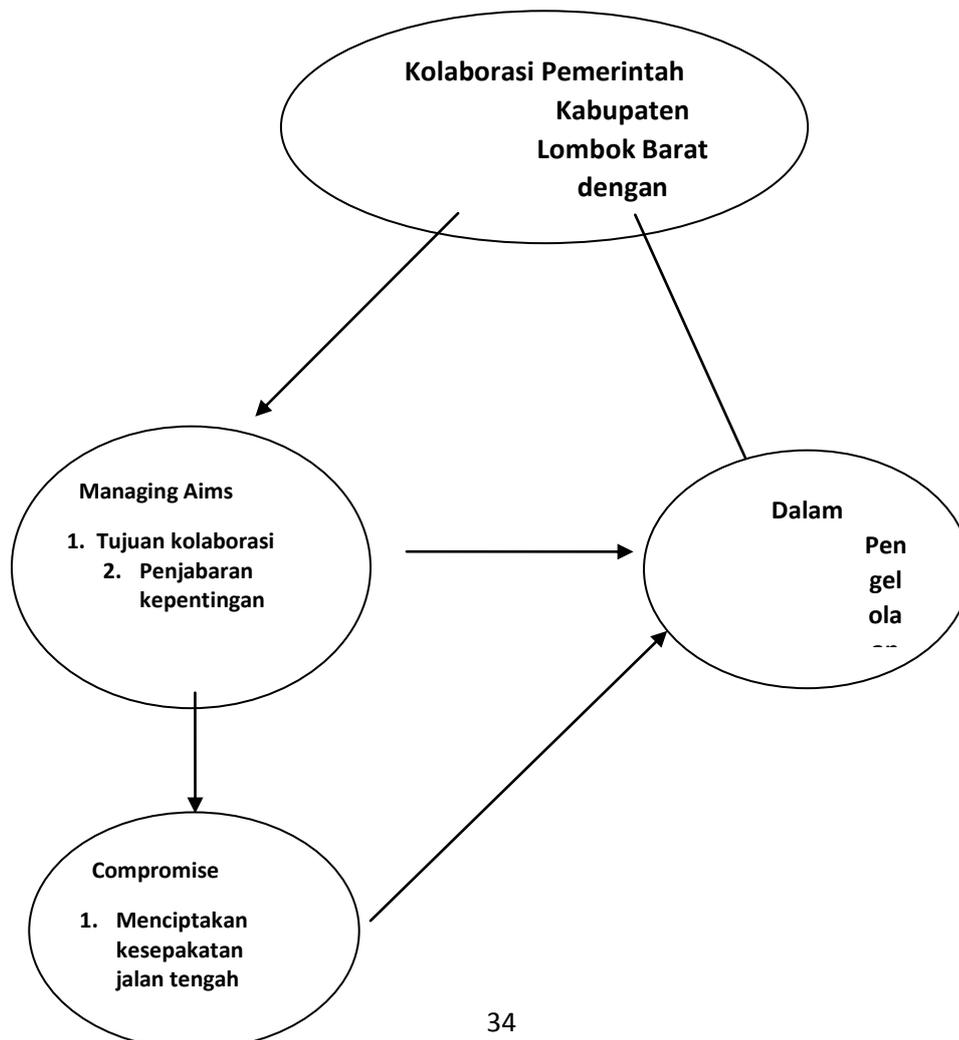
Pemerintah Daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar pertimbangan: menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat; melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami; dalam rangka

mengambil alih perusahaan asing; menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah; dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat, dan/atau menebus biaya, serta menghasilkan penerimaan untuk Pemerintah Daerah.

PDAM Giri Menang Mataram mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia air minum bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. PDAM Giri Menang Mataram bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sesuai dengan standar mutu dan kesehatan.

2.4 Kerangka Teori

Gambar 2.2 kerangka Teori



Sumber: *Huxham dan Siv Vangen 1996*

2.5 Definisi Konseptual

1. Kolaborasi pemerintahan atau *collaborative governance* sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sektor publik sendiri. Pengaturan ini ditandai dengan upaya bergabung, harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antara entitas otonom resmi, dari dua atau lebih sektor-publik, profit dan nonprofit dalam rangka meningkatkan (membangun) atribut unik dan sumber daya dari masing-masing). Definisi Tang dan Masmanian menekankan pada penyelesaian masalah public dengan melibatkan dua atau lebih sektor *publik profit* dan *nonprofit*.
2. Enam hal dalam proses kolaborasi antar organisasi. Ke-enam hal tersebut adalah; (a) *managing aims*, (b) *compromise*, (c) *communication*, (d) *democracy and equality*, (e) *power and trust*, dan (f) *determination commitment and stamina*.

2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua variable sebagai berikut:

1. Managing Aims

- a. Tujuan kerjasama
 - b. Penjabaran kepentingan
2. Compromise
 - a. Menciptakan kesepakatan jalan tengah

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Sesaot Kecamatan Narmada wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:15)

Metodologi dalam suatu karya ilmiah seperti paper, makalah, lebih-lebih skripsi dan disertasi sangatlah mutlak adanya dan tidaklah berlebihan. Tanpa metodologi dalam suatu kerangka karya ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak mempunyai ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar ilmiahnya.

Sumber data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek diteliti, sumber data yang digunakan berasal dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Moleong, 2017, hlm. 157-158).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Moleong, 2017, hlm. 159-160).

3.4 Teknik Pengambilan Data

a. Wawancara

Menurut Moleong (2000:135) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Tekhnik wawancara sangat tepat untuk melengkapi data yang bersumber dari narasumber atau informan. Yang dalam penelitian kualitatif

khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara sebab peneliti ingin menggali informasi dari para informan dengan tatap muka secara langsung, dari sinilah peluang berbagai pertanyaan yang berhubungan langsung dengan proses penelitian akan terungkap.

b. Observasi (pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data dari sumber data yang berupa tulisan, angka, gambar atau grafik serta rekaman gambar yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak berpartisipasi karena peneliti hanya berperan sebagai pengamat saja dan tidak turut sebagai aktor yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Sugiyono dalam Dadang Iskandar (2015, hlm. 51).

Dengan teknik ini peneliti bisa mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian untuk mendapatkan data-data terkait dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sehingga nantinya juga hasil foto dan bukti fisik yang ditemukan dapat dicetak setelah penelitian ini dilaksanakan.

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, (2013:246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori diagram aliran (*flowchart*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (sugiyono, 2014:91-99).

3.5 Metode Penentuan Responden

Dalam penentuan responden dalam penelitian ini adalah menggambarkan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Yaitu teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena sudah terlebih dahulu mengetahui tentang bagaimana fokus dan lokasi objek penelitian adapun bagian dari informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Responden	Volume
1.	Kasubag (kepala sub bagian) Kerjasama dan Otonomi Daerah bagian Administrasi pemerintahan Setda (Sekretariat Daerah) Kabupaten Lombok Barat.	1 orang
2.	Kasubag (kepala sub bagian) ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.	1 orang

3.	Asisten I Setda (sekretariat Daerah) Kota Mataram	1 orang
4.	Manajer Perencanaan dan Pengembangan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Giri Menang	1 orang

3.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik ini untuk keperluan atau sebagai pembanding. Pada penelitian ini teknik *triangulasi* data dilakukan dengan membandingkan yang sama atau pada informan yang berbeda, artinya apa yang diperoleh dari sumber satu, bisa lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda sehingga keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan jawaban antara informan satu dengan informan lainnya. Selain itu peneliti juga membandingkan dengan data yang diperoleh dari dokumen dan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Dengan demikian suatu data akan dapat dikontrol oleh data yang sama namun dari sumber yang berbeda.

